

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia di bidang kependudukan adalah pertumbuhan penduduk yang masih tinggi terjadinya ledakan penduduk di Indonesia semakin nyata. Mewujudkan derajat kesehatan ibu yang setinggi-tingginya adalah salah satu agenda pembangunan yang sejalan dengan Tujuan pembangunan berkelanjutan (Susanti, 2020).

Program KB (Keluarga Berencana) menekankan pada kegiatan membantu keluarga untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran dan peningkatan keluarga sejahtera (Fiqhy *et al.*, 2018). Data dari *World Health Organisation* (WHO) bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi di Dunia 13,6% dan di negara maju PUS yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 7,6% dan di negara-negara yang sedang berkembang sudah mengalami peningkatan dengan jumlah 14,5% (Imbarwati, 2016).

Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 bahwa jumlah peserta KB modern di Indonesia adalah 62,98%. Sementara berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 bahwa penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) hanya 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa minat pasangan usia subur (PUS) dalam menggunakan MKJP di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Jumlah aseptor KB di Provinsi Aceh pada tahun 2018 adalah 265.897 pasangan usia subur atau hanya 30% dimana persentase penggunaan berdasarkan

jenis kontrasepsi adalah 6% menggunakan kondom, 56% menggunakan suntik, 32% menggunakan pil, 3% menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, 0% MOP, 1% MOW dan 2% menggunakan implant (Dinkes Aceh, 2018).

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu target pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dimana yang termasuk dalam kategori MKJP ini adalah jenis susuk/implant, IUD, MOP, MOW. Studi yang dilakukan oleh Alehegnv dan Abebaw (2018), menunjukkan bahwa 37% responden menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Kontrasepsi menggunakan suntik atau Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (NMJKP) merupakan metode yang paling umum digunakan.

Pasangan usia subur memerlukan penyuluhan kesehatan atau konseling untuk membantu menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Dalam hal ini harus ada penyuluh kesehatan yang mempromosikan KB (Keluarga Berencana) bagi pasangan ini. Tujuannya adalah untuk mengatur jarak kelahiran anak sehingga kesehatan ibu dan anak terjamin, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia melalui pengendalian jarak kelahiran serta memperbaiki usia harapan hidup masyarakat (Hasibuan *et al.*, (2018).

Pelaksana pelayanan KB wajib memberikan nasehat tentang metode yang paling cocok sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik sebelum pelayanan KB diberikan kepada klien akan lebih mudah menentukan pilihan. Klien juga harus diberi informasi tentang kontraindikasi pemakaian berbagai metode kontrasepsi. Layanan konseling merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Bidan kepada pasangan suami istri untuk membantu memecahkan permasalahan dalam

keluarga, khususnya mengenai keturunan (anak) dan kekerasan seksual, dan penggunaan alat kontrasepsi yang tepat bagi pasangan usia subur (PUS).

Konseling di lakukan oleh pasangan suami istri yang telah di rekomendasikan oleh PLKB untuk menemui pihak yang ahli dibidangnya yaitu bidan agar permasalahan PUS dalam kesehatan reproduksi serta dalam penggunaan alat kontrasepsi dapat terpecahkan, baik dari keluhan ibu muda atau pun dari pihak suami. Selanjutnya konseling ini dilakukan untuk mengarahkan klien dalam pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan PUS dan bertujuan untuk mengatur jumlah anak yang diinginkan serta memberikan jarak kelahiran yang tidak terlalu rapat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Penyuluh PLKB yang ada di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah Penyuluh PLKB sebanyak 3 Penyuluh, sedangkan wilayah cangkupan yang harus ditangani Penyuluh sebanyak 14 desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya permasalahan juga terjadi adalah ketakutan masyarakat khususnya PUS adalah kurangnya pemahaman tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) akibat dari kurangnya sosialisasi/konseling yang dilakukan PLKB karena faktor jumlah Penyuluh PLKB dengan jumlah wilayah yang harus ditangani. Kurangnya sosialisasi/konseling yang dilakukan mengakibatkan ketakutan masyarakat khususnya PUS dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat 126 PUS dan 25 PUS 4T dengan jumlah KB aktif sebanyak 82 PUS. Dari data yang diperoleh diketahui

terdapat 12 PUS menggunakan kondom, 30 PUS menggunakan PB, 13 PUS menggunakan suntik, 12 PUS menggunakan implan, 11 PUS menggunakan MOW, dan hanya ada 4 PUS yang menggunakan AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). Selain dari hal ini menjadi fokus peneliti pada penelitian ini karena IUD (spiral) termasuk kedalam AKDR. Selain permasalahan diatas, permasalahan lain adalah pada pasangan suami istri khususnya suami tidak mengizinkan pemasangan alat kontrasepsi (spiral) pada alat kelamin istrinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Puskesmas Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Puskesmas Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui peran PLKB pada pasangan usia subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Puskesmas Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas konseling Penyuluh PLKB terhadap MKJP di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Untuk mengetahui pengaruh hambatan Penyuluh PLKB terhadap MKJP di Puskesmas Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas Penyuluh PLKB terhadap pemilihan MKJP di Puskesmas Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi PLKB

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi bagi PLKB dalam membantu PUS memilih metode kontrasepsi jangka panjang yang akan di gunakan.

2. Bagi Pasangan Usia Subur

Menjadi alat evaluasi pribadi pasangan usia subur untuk menambah pengetahuan tentang metode kontrasepsi jangka panjang.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang bimbingan konseling pada pasangan usia subur (PUS) dalam penggunaan alat kontrasepsi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama.